



# 43 Miliar Anggaran KPU Manado Wajib Dibeber

Perlu Diingat,  
Polda Sulut  
Tengah  
Bersih-bersih

EDITOR :  
**BALLADEWA SETLIGHT**  
(UKW 17394)

**MANADO** — Sorotan tajam kini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado terkait dana hibah Pilkada yang diterima sebesar Rp 43 miliar. Dana yang sangat besar ini menuai kritik dari masyarakat setempat, khususnya terkait transparansi penggunaannya. Kritik masyarakat terkait transparansi dana hibah ini turut diperkuat dengan adanya program pemberantasan korupsi yang saat ini sedang dicanangkan oleh Polda Sulut dan Polresta Manado. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto

untuk memberantas segala bentuk korupsi yang menghambat pembangunan dan menodai kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Dalam sebuah wawancara eksklusif, Vicky Siwa masyarakat Kota Manado, menantang KPU Manado untuk lebih terbuka mengenai rincian penggunaan dana hibah tersebut. "Dana hibah sebesar ini seharusnya bisa menjamin kemeriahan dan partisipasi publik yang optimal dalam Pilkada. Namun, sayangnya, gema Pilkada di Kota Manado terasa sepi, tidak meriah seperti yang diharapkan," ungkapnya.

Vicky juga menyoroti bahwa belum ada penjelasan publik yang memadai dari pihak KPU mengenai bagaimana anggaran

besar ini dibelanjakan. "Jika dana tersebut benar-benar dialokasikan dengan transparan dan tepat sasaran, maka masyarakat akan melihat dampak nyata dalam hal sosialisasi Pilkada, edukasi pemilih, serta peningkatan fasilitas pendukung pelaksanaan pemilu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Manado Ferley Kaparang tidak bisa berkomentar banyak terkait sudah berapa persen realisasi anggaran 43 Miliar milik KPU Kota Manado. "Musti cek di sekretariat itu kawan, coba langsung ke sekretaris kuasa pengguna anggaran," singkatnya.

Sejumlah pihak, menyerukan agar ada audit yang menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah Pilkada ini. KPU Manado

perlu memberikan penjelasan rinci mengenai alokasi anggaran, mulai dari biaya sosialisasi, honor panitia pemilu, hingga persiapan teknis lainnya. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang publik ini dibelanjakan, terutama mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.

Di tengah suasana Pilkada yang dianggap kurang bergema, masyarakat berharap agar kritik ini menjadi momentum bagi KPU Manado untuk lebih terbuka dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama dana hibah sebesar Rp 43 miliar ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. (\*)